

Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar

Zul Kahfi¹, Ari Sarwo Indah Safitri², Andi Nurhasanah³, Sri Rahayu Indah Azhari⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh inventarisasi, pembukuan dan pelaporan terhadap pengaman aset daerah pada Pemerintah Kota Makassar. Data dalam penelitian ini diperoleh dari pegawai Pemerintah Kota Makassar yang bersedia menjadi responden. Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara melakukan penelitian langsung dilapangan dengan memberikan kuesioner/lembar pertanyaan kepada 73 responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: variabel inventarisasi, pembukuan dan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan aset daerah Pemerintah Kota Makassar. Inventarisasi merupakan variabel yang lebih dominan berpengaruh terhadap Pengamanan Aset daerah Pemerintah Kota Makassar.

Kata kunci: Inventarisasi, pembukuan, pelaporan dan pengamanan aset daerah

Copyright (c) 2023 Ari Sarwo Indah Safitri

✉ Corresponding author :

Email Address : Indahsafitri95@gmail.com

PENDAHULUAN

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada (Permendagri no.28 tahun 2016).

Sejalan dengan upaya perwujudan otonomi daerah dan Good Governance, maka harus memperhatikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah yang berhasil maupun yang mengalami kegagalan dalam menjalankan tugasnya, Dalam konteks birokrasi pemerintah, akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan, Manajemen suatu organisasi apapun dikatakan akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah menentukan tujuan (Goal) yang tepat, mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menerapkan pemakaian standar serta mengembangkan standar organisasi dan operasi searah efektif dan efisien (Darise, 2009).

Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan, Oleh karena itu, sistem pengendalian intern atas manajemen/pengelolaan aset tetap daerah harus handal untuk mencegah

penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah (BPK RI, 2010), Aset tetap/barang milik daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah bukan hal yang mudah sering kali terdapat berbagai persoalan aset daerah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah, Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset sehingga laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan aset.

Sebagaimana diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar tahun 2012, 2013, 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan wajar dengan pengecualian, namun pada tahun 2015 LAPD Kota Makassar oleh Badan Pemeriksa Keuangan mendapatkan wajar tanpa pengecualian (beritakota, 2016). LKPD merupakan rapor pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan amanat yang dipercayai rakyat, utamanya yang terkait dengan penggunaan anggaran, juga kepada stakeholder lainnya (lembaga donor, dunia usaha, dll). Dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan negara diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan BMD yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian BMD tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database BMD yang akurat, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada lembaga negara.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 (Permendagri no.19 tahun 2016)

Penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah, Pembukuan/Pencatatan merupakan proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pelaporan merupakan proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pembukuan (Darise, 2009).

Ketidakakuratan sistem pencatatan aset disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pada saat perencanaan anggaran dimana belanja yang dilakukan tidak dilakukan verifikasi secara memadai sehingga terjadi kesalahan dalam pencatatan atas belanja yang dianggap sebagai Belanja Modal yang akan menambah jumlah aset daerah. Padahal belanja yang dilakukan tidak untuk dimiliki/digunakan sendiri oleh pemerintah daerah sehingga Belanja Modal tersebut tidak menambah jumlah aset daerah, Termasuk dalam pencatatan tersebut, pengelola aset yang belum memahami perbedaan aset daerah dengan barang inventaris yang benar-benar dimiliki oleh daerah, Sementara di pihak lain ada barang yang digunakan dan ada di daerah tetapi bukan milik daerah (Zanuddin, 2011).

Pengadaan barang oleh pemerintah daerah selama ini juga polanya kebanyakan hanya untuk membeli dan bukan untuk mengelola bahkan mengabaikan pemanfaatannya. Aset atau barang yang sudah dibeli tidak lagi menjadi perhatian bahkan tidak pernah dilakukan pengendalian secara memadai misalnya melakukan inventarisasi secara periodik. Contoh-contoh tersebut di atas secara administratif menjadi kelemahan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan asset, Selain kelemahan Pemerintah Daerah yang melakukan pembiaran dengan tidak mengurus administrasi kepemilikan, inventarisasi aset dengan benar, juga rawan pengalihan hak dari aset-aset tersebut kepada orang lain baik individu maupun korporasi. Pengelolaan aset yang tidak dilakukan dengan baik menimbulkan kerawanan hilangnya aset daerah, Bahkan terjadi silang sengketa antara Pemerintah Daerah dengan warga atau masyarakat yang mengklaim aset tersebut adalah miliknya (Zulpikar, 2010).

Dengan beberapa fakta yang terjadi maka sangatlah tepat jika pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan beberapa regulasi yang salah satu diantaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 (Permendagri no.19 tahun 2016) sehingga diharapkan dapat memperbaiki/ menyempurnakan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ada saat ini. Dimana regulasi seperti ini diharapkan juga akan berpengaruh terhadap pengamanan aset daerah yang nantinya berdampak pula terhadap mata anggaran untuk penambahan asset daerah pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang ditentukan dari Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dapat dikurangi mengingat barang milik daerah yang lama masih layak untuk dipergunakan oleh masyarakat sebagai efek dari pengelolaan yang baik yang masih merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji besar pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap pengamanan asset daerah pada Pemerintah Kota Makassar.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Stewardship Theory

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson 2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi

semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/principals*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih *capable* dan siap. Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah = *trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*.

Objek penelitian ini adalah bagian dari organisasi sektor publik yaitu Pemerintah Daerah. Penelitian ini akan menguji efek pembelajaran teori *stewardship* terhadap kemampuan pegawai dan pengaruhnya terhadap efektivitas pengamanan asset daerah, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi yang diukur melalui kualitas laporan dalam konteks informasi akuntansi.

1. Pengertian Aset dan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 tentang Akuntansi Aset tetap, menyatakan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Bastian, 2006).

Adapun pengertian sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan satu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi, pengertian sistem yang lainnya adalah Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat (Andriani, 2009).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pejabat pengelola barang milik daerah yang terdiri dari: (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah; (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang; (3) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah

selaku pembantu pengelola; (4) Kepala SKPD selaku pengguna; (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna; (6) Penyimpan barang milik daerah; dan (7) Pengurus barang milik daerah.

2. Pengertian Barang Milik Daerah

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada (Permendagri no.28 tahun 2016)

Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dann/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Barang Milik Daerah termasuk dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, berupa persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan.

Dari uraian diatas, yang dimaksud aset daerah adalah aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, sedngkan yang dimaksud dengan barang daerah adalah Persediaan (bagian dari aset lancar) ditambah seluruh aset tetap yang ada di neraca daerah.

3. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Yang dimaksud dengan penatausahaan dalam Permendagri no. 17 tahun 2007 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

a. Pembukuan

Menurut penjelasan Permendagri No.8 tahun 2016 disimpulkan bahwa yang dimaksud denan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milk daerah. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).

b. Inventarisasi

Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang

dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independent.

Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan sebagainya.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris.

Sementara itu Barang Milik/Kekayaan Negara yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah, maka pengguna mencatatnya dalam Buku Inventaris tersendiri dan dilaporkan kepada pengelola.

c. Pelaporan

Dalam Permendagri No. 17 tahun 2016 disebutkan bahwa pelaporan barang milik daerah yang dilakukan Kuasa pengguna barang disampaikan setiap semester, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan

5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah. Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada:

- a. Laporan Mutasi Barang; dan
- b. Daftar Mutasi Barang

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Analisis

Sehubungan pendekatan penelitian adalah penelitian kuantitatif maka analisis yang digunakan adalah:

1. Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik.

Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Kuncoro, 2009). Analisis deskriptif dalam penelitian ini menjelaskan karakteristik responden dan tanggapan responden terhadap variabel penelitian.

2. Uji instrument

a. Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, maka kesediaan dan ketelitian dari para responden untuk menjawab setiap pertanyaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Keabsahan suatu jawaban sangat ditentukan oleh alat ukur yang ditentukan. Untuk itu, dalam melakukan uji kualitas data atas data primer ini peneliti melakukan uji validitas dan uji reabilitas.

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Mengukur validitas dapat menggunakan *Pearson Correlation* dan dilakukan dengan cara melakukan korelasi bivariate antara masing - masing skor indikator pertanyaan terhadap total konstruk dengan menunjukkan hasil yang signifikannya itu dibawah 0,05. Jika masing - masing indikator pertanyaan mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0,05 berarti dikatakan valid (Ghozali, 2009).

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan *cronbach alpha* nya memiliki nilai lebih besar 0,60 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi alat ukur yang akan. (Ghozali, 2009).

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Ghozali (2009) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *Normal Probability Plot*. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. (Ghozali, 2009).

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Selain itu, deteksi terhadap multikolinieritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing - masing variabel terhadap variabel dependen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dilakukan menghitung nilai *variance inflation factor* (VIF) dari tiap - tiap variabel independen. Nilai VIF kurang dari 10 menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen masih bisa ditolerir (Ghozali, 2011).

3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu observasi ke observasi lain.

Heteroskedastisitas menggambarkan nilai hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *Studentized Delete Residual* nilai tersebut. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada satu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot model*. Analisis pada gambar *Scatterplot* yang menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

c. Uji Hipotesis**1) Analisis Regresi Berganda**

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel tergantung atau dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen. Model persamaannya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan :

Y : Pengamanan Aset Daerah

- X_1 : Inventarisasi
 X_2 : Pembukuan
 X_3 : Pelaporan
 α : Konstanta
 β_1, β_3 : Koefisien regresi
 e : Epsilon

2) Koefisien determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2009) koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai R Square (R^2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu skeptisme profesional auditor terhadap pemberian opini audit. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

3) Uji Parsial (Uji-t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel individu independen secara individu dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2009). Uji t dapat juga dilakukan dengan hanya melihat nilai signifikansi t. Masing - masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi menggunakan SPSS. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari pada 0,05 (untuk tingkat signifikansi=5%), maka variabel independen secara satu persatu berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari pada 0,05 maka variabel independen secara satu persatu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Uji F (Uji Simultan)

Uji simultan digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas secara menyeluruh terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan uji F. Uji ini menggunakan α 5%. Dengan ketentuan, jika signifikansi dari F hitung < dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan dapat diterima. Hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel Uji F (Uji Simultan)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	204.917	3	68.306	16.045	.000 ^b
	Residual	293.741	69	4.257		
	Total	498.658	72			

a. Dependent Variable: PengamananAsetDaerah

b. Predictors: (Constant), Pelaporan, Inventarisasi, Pembukuan

Sumber: data yang diolah, 2022

Tabel menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa inventarisasi, pembukuan dan pelaporan secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap pengamanan aset daerah dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengamanan aset daerah.

2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung. Jika nilai signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :

Tabel Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.025	4.352		.235	.815
Inventarisasi	.395	.101	.363	3.925	.000
Pembukuan	.393	.171	.288	2.295	.025
Pelaporan	.429	.194	.277	2.208	.031

a. Dependent Variable: PengamananAsetDaerah

Sumber : data yang diolah, 2022

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Inventarisasi (X_1), Pembukuan (X_2) dan Pelaporan (X_3) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Pengamanan Aset Daerah (Y).

a) Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Tabel 17 menunjukkan bahwa variabel inventarisasi memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa inventarisasi berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap. Nilai t yang bernilai +3,925 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

b) Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Tabel 17 menunjukkan bahwa variabel pembukuan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,025 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_2 diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa pembukuan berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap. Nilai t yang bernilai +2,295 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

c) Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)

Tabel ini menunjukkan bahwa variabel pelaporan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,031 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_3 diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa pelaporan berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap. Nilai t yang bernilai +2,208

menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda.

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 1,025 + 0,395 X_1 + 0,393 X_2 + 0,429 X_3$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta adalah 1,025 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (inventarisasi, pembukuan dan pelaporan) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (pengamanan asset daerah) sebesar 1,025 satuan.
- Koefisien regresi inventarisasi (b_1) adalah 0,395 dan bertanda positif. Hal ini berarti, jika variabel X_1 (Inventarisasi) variabel Y (Pengamanan Asset Daerah) akan mengalami peningkatan sementara variabel lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel inventarisasi (X_1) dengan variabel pengamanan asset tetap (Y). Semakin baik inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar maka pengamanan asset daerah akan semakin baik.
- Koefisien regresi pembukuan (b_2) adalah 0,393 dan bertanda positif. Hal ini berarti, jika variabel X_2 (Pembukuan) variabel Y (Pengamanan Asset Daerah) akan mengalami peningkatan sementara variabel lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pembukuan (X_2) dengan variabel pengamanan asset tetap (Y). Semakin baik pembukuan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar maka pengamanan asset daerah akan semakin baik.
- Koefisien regresi pelaporan (b_3) adalah 0,429 dan bertanda positif. Hal ini berarti, jika variabel X_3 (Pelaporan) variabel Y (Pengamanan Asset Daerah) akan mengalami peningkatan sementara variabel lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pelaporan (X_3) dengan variabel pengamanan asset tetap (Y). Semakin baik pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar maka pengamanan asset daerah akan semakin baik.

4. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel Hasil Uji R^2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.641 ^a	.411	.385	2.06328
a. Predictors: (Constant), Pelaporan, Inventarisasi, Pembukuan				
b. Dependent Variable: PengamananAsetDaerah				

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Dari tabel 19 terdapat angka R sebesar 0,641 yang menunjukkan bahwa hubungan antara pengamanan aset daerah dengan ketiga variabel independennya kuat, karena mendekati defenisi kuat yang angkanya diatas 0,60. Sedangkan nilai R square sebesar 0,411 atau 41,1 % ini menunjukkan bahwa variabel pengamanan aset daerah dapat dijelaskan oleh variabel inventarisasi, pembukuan dan pelaporan sebesar 41,1% sedangkan sisanya 58,9% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

1. Pengaruh Inventarisasi Terhadap Pengamanan Aset Daerah

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel inventarisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan aset daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik inventarisasi maka pengamanan aset daerah akan semakin baik. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independent.

Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan sebagainya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2008) yang menyatakan bahwa inventarisasi memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pengamanan aset daerah pada kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mifitri (2009) yang menyatakan bahwa inventarisasi memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pengamanan aset daerah pada kabupaten Langkat.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriany (2009) yang menyatakan bahwa inventarisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset daerah kota Medan.

2. Pengaruh Pembukuan Terhadap Pengamanan Aset Daerah

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel pembukuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan aset daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pembukuan maka pengamanan aset daerah akan semakin baik. Pembukuan merupakan proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2008) yang menyatakan bahwa pembukuan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pengamanan aset daerah pada kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mifitri (2009) yang

menyatakan bahwa pembukuan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pengamanan aset daerah pada kabupaten Langkat.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriany (2009) yang menyatakan bahwa pembukuan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset daerah kota Medan.

3. Pengaruh Pelaporan Terhadap Pengamanan Aset Daerah

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan aset daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaporan maka pengamanan aset daerah akan semakin baik. Pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2008) yang menyatakan bahwa pelaporan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pengamanan aset daerah pada kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mifitri (2009) yang menyatakan bahwa pelaporan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pengamanan aset daerah pada kabupaten Langkat.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriany (2009) yang menyatakan bahwa pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset daerah kota Medan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara inventarisasi terhadap pengamanan aset daerah pada Pemerintah kota Makassar.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembukuan terhadap pengamanan aset daerah pada Pemerintah kota Makassar.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pelaporan terhadap pengamanan aset daerah pada Pemerintah kota Makassar.

Referensi :

- Andriany, 2009, Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit di Bali. Skripsi . UniversitasUdayana
- Darise, N 2009. AKuntansi Keuangan, Jakarta PT Indeks
- Ghozali, Imam 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Semarang
- ZULFIKAR, 2010. MANAJEMEN RISET DENGAN PENDEKATAN KOMPUTERISASI STATISKA, YOGYAKARTA.